



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Ismananda Azimatulloh

022119007

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2024



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf T.Irawan S.E., M.E., Ph. D)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CSSA,
CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
pada hari kamis 25 Juli 2024

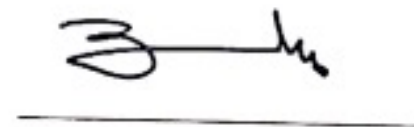
Ismananda Azimatulloh
022119007

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM. CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sujatmiko Wibow S.T., M.Ak)



PERNYATAAN PELIMPAAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismananda Azimatulloh

NPM : 022119007

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain setelah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan

Bogor, 25 Juli 2024



Ismananda Azimatulloh

022119007

HAK CIPTA

**Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun
2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Ismananda Azimatulloh, 022119007, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022. Di bawah bimbingan bapak Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM. dan bapak Sujatmiko Wibowo S.T., M.Ak, 2024

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan sampel yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoliniertas, dan uji heteroskedastisitas, lalu dilakukan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PRAKATA

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini dengan semaksimal mungkin dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, begitu banyak pihak yang telah bersedia terlibat dan membantu serta mendorong dalam usaha menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua tercinta, kakak dan adik yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat dan dukungan dalam bentuk apa pun dan juga doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Towaf T. Irawan S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
7. Bapak Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sujatmiko Wibowo S.T., M.Ak. yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.

10. Teruntuk Sahabat-sahabatku dalam PPRF selalu menemani dan menyemangati penulis dalam hal apa pun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2019, khususnya kelas A Akuntansi yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
12. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungannya yang telah memberikan semangat di masa-masa sulit, terima kasih.

Penulis menyadari dalam penelitian masih terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam proposal penelitian ini, segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan proposal penelitian ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, 25 Juli 2024

Penulis



Ismananda Azimatulloh

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | vi |
| PRAKATA..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah | 5 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.2.2 Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Masalah | 6 |
| 1.3.1 Maksud Penelitian | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Kegunaan Praktis | 6 |
| 1.4.2 Kegunaan akademis | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1 Pendapatan Asli Daerah | 7 |
| 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah | 7 |
| 2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah..... | 7 |
| 2.1.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah | 10 |
| 2.2 Dana Perimbangan | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Dana Perimbangan | 11 |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan | 11 |
| 2.2.3 Pengukuran Dana Perimbangan | 12 |
| 2.3 Kinerja Keuangan..... | 13 |
| 2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan | 13 |
| 2.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan | 13 |
| 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran | 14 |
| 2.4.1 Penelitian Sebelumnya | 14 |
| 2.4.2 Kerangka Pemikiran..... | 24 |
| 2.5 Hipotesis Penelitian..... | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 28 |
| 3.2 | Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian | 28 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data Penelitian | 28 |
| 3.3.1 | Jenis Data Penelitian | 28 |
| 3.3.2 | Sumber Data Penelitian..... | 28 |
| 3.4 | Operasionalisasi Variabel..... | 29 |
| 3.5 | Metode Penarikan Sampel..... | 29 |
| 3.5.1 | Populasi Penelitian | 29 |
| 3.5.2 | Sampel Penelitian..... | 30 |
| 3.6 | Metode Pengumpulan Data | 30 |
| 3.7 | Metode Pengolahan/Analisis Data | 30 |
| 3.7.1 | Statistik Deskriptif | 30 |
| 3.7.2 | Uji Asumsi Klasik | 30 |
| 3.7.3 | Uji Regresi Linear Berganda..... | 33 |
| 3.7.4 | Uji Hipotesis..... | 33 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 36 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 36 |
| 4.1.1 | Kondisi Geografis Kabupaten Cianjur | 36 |
| 4.1.2 | Visi dan Misi Kabupaten Cianjur..... | 37 |
| 4.1.3 | Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur | 38 |
| 4.2 | Hasil Pengumpulan Data..... | 39 |
| 4.2.1 | Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur..... | 40 |
| 4.2.2 | Dana Perimbangan Kabupaten Cianjur | 42 |
| 4.2.3 | Kinerja Keuangan Kabupaten Cianjur | 44 |
| 4.3 | Analisis Data | 48 |
| 4.3.1 | Analisis Deskriptif Statistik | 48 |
| 4.3.2 | Uji Asumsi Klasik | 49 |
| 4.3.3 | Analisis Regresi Linear Berganda..... | 52 |
| 4.3.4 | Analisis Uji Hipotesis | 53 |
| 4.4 | Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian | 55 |
| 4.4.1 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan | 56 |
| 4.4.2 | Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan | 57 |
| 4.4.3 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan..... | 58 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | | 59 |
| 5.1 | SIMPULAN | 59 |
| 5.2 | SARAN | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 61 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Skala interval desentralisasi | 2 |
| Tabel 1. 2 Data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Periode 2018-2022 | 3 |
| Tabel 1. 3 Data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Kabupaten Cianjur Periode 2018-2022 | 3 |
| Tabel 1. 4 Kriteria rasio kemandirian keuangan | 4 |
| Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah..... | 10 |
| Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Rasio Ketergantungan | 12 |
| Tabel 2. 3 Penelitian Sebelumnya..... | 15 |
| Tabel 3. 1 Operasional Variabel..... | 29 |
| Tabel 3. 2 Klasifikasi Koefisien Determinasi (R^2)..... | 34 |
| Tabel 4. 1 Rasio Efektivitas pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022..... | 40 |
| Tabel 4. 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah..... | 41 |
| Tabel 4. 3 Rasio Ketergantungan pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022..... | 42 |
| Tabel 4. 4 Klasifikasi Kriteria Nilai Rasio ketergantungan | 43 |
| Tabel 4. 5 Derajat Desentralisasi pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 | 44 |
| Tabel 4. 6 Skala interval desentralisasi | 45 |
| Tabel 4. 7 Rasio Kemandirian pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 | 46 |
| Tabel 4. 8 Kriteria rasio kemandirian keuangan | 47 |
| Tabel 4. 9 Analisis Statistik Deskriptif | 48 |
| Tabel 4. 10 Uji Normalitas..... | 49 |
| Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas | 50 |
| Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedasitas Glejser | 51 |
| Tabel 4. 13 Uji Autokorelasi..... | 51 |
| Tabel 4. 14 Uji Koefisien Regresi Linear Berganda | 52 |
| Tabel 4. 15 Uji (R^2)..... | 53 |
| Tabel 4. 16 Uji t | 54 |
| Tabel 4. 17 Hasil Uji F | 55 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... | 26 |
| Gambar 4 1 Rasio Efektivitas Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022..... | 41 |
| Gambar 4 2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 | 43 |
| Gambar 4 3 Derajat Desentralisasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022..... | 45 |
| Gambar 4 4 Rasio Kemandirian Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara kepulauan yang terbagi atas beberapa provinsi, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah memiliki pemerintahan, hak, dan kewajiban sendiri.

Menurut Mahmudi dalam mardiani (2022) “Tujuan dari penerapan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan, dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.”

Pendapatan asli daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diikuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan konsep otonomi dan desentralisasi secara jelas. Otonomi daerah dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah konsep utama adalah pemberian desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan disertai dengan pemberian dana

perimbangan (*fiscal decentralization*) kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dengan pengukuran kinerja keuangan yaitu salah satunya melalui Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu di tunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal tinggi, diharapkan akan menjadi daerah yang maju dan semakin berkembang. Sebaliknya, daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal rendah akan tertinggal dalam pembangunan daerahnya dan perlu adanya upaya dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sari dalam Putri, 2022).

Kinerja keuangan daerah yang baik salah satunya dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan alokasi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah (Ramadhan, 2022).

Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat desentralisasi dapat dilihat dari pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Skala interval desentralisasi

| | |
|----------------|---------------|
| 00,00-10,00% | Sangat Kurang |
| 10,01-20,00% | Kurang |
| 20,01-30,00% | Sedang |
| 30,01-40,00% | Cukup |
| 40,01-50,00% | Baik |
| Lebih dari 50% | Sangat Baik |

Berikut ini telah disajikan data anggaran realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cianjur Periode 2018-2022

Dalam Miliar Rupiah

| Tahun | PAD | Pendapatan Daerah | Persentase |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| 2018 | 569,84 | 4017,39 | 14,18% |
| 2019 | 628,56 | 3995,41 | 15,73% |
| 2020 | 577 | 3840,5 | 15,02% |
| 2021 | 792,91 | 4055,7 | 19,55% |
| 2022 | 556,04 | 3978,96 | 13,97% |
| Rata-rata | | | 15,69% |

Sumber: BAPENDA Kabupaten Cianjur

Kemandirian keuangan daerah terlihat pada perbandingan dari PAD terhadap pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD dibandingkan dengan pendapatan lainnya (Suci dan Asmara dalam Alvaro, 2020)

Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal (Musgrave dalam Alvaro, 2020)

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rasio kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim dalam Alvaro, 2020). Berikut tabel yang menggambarkan rasio kemandirian daerah:

Tabel 1. 3
Data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Kabupaten
Cianjur Periode 2018-2022

Dalam Miliar Rupiah

| Tahun | PAD | Dana Transfer | Persentase |
|-----------|--------|---------------|------------|
| 2018 | 569,84 | 2618,40 | 21,76% |
| 2019 | 628,56 | 2686,07 | 23,40% |
| 2020 | 577 | 2515,68 | 22,94% |
| 2021 | 792,91 | 2602,14 | 30,47% |
| 2022 | 556,04 | 2893,09 | 19,22% |
| Rata-rata | | | 23,56% |

Sumber: BAPENDA Kabupaten Cianjur

Rasio Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya. Kriteria untuk menetapkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 1. 4
Rasio Kemandirian Keuangan

| Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian |
|--------------------|-------------------|
| Rendah Sekali | 0-25% |
| Rendah | >25-50% |
| Sedang | >50-75% |
| Tinggi | >75-100% |

Sumber: (Halim dalam Runjung, 2022)

Berdasarkan data di atas, tingkat kemandirian keuangan daerah selama periode tahun anggaran 2018-2022 dengan persentase 25-50%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2018-2022 memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Artinya peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Rasio desentralisasi dan kemandirian merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun menunjukkan hasil penelitian yang berbeda.

Penelitian serupa sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Tianawati (2022) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Jauhariah (2022) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ermawati (2021) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Pangestu (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pada penelitian ini merupakan replikasi dari Euis Tilis Tianawati (2022) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Alasan melakukan replikasi yaitu untuk mengetahui apakah penelitian ini jika dilakukan di Kabupaten Cianjur akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda mengingat adanya perbedaan karakteristik suatu daerah penelitian.

Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan Euis Tilis Tianawati (2022) adalah:

1. Unit analisis
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sedangkan penelitian Euis Tilis Tianawati (2022) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Sampel penelitian
sampel pada penelitian Laporan Realisasi Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018-2022, sedangkan penelitian Euis Tilis Tianawati (2022) Laporan Realisasi Kabupaten Bogor tahun 2016-2020.
3. Periode yang diteliti
Periode penelitian ini pada tahun 2018-2022, sedangkan pada penelitian Euis Tilis Tianawati (2022) pada tahun 2016-2020

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas dan juga adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu,

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio desentralisasi dan kemandirian mencerminkan bahwa kinerja keuangan masih rendah, hal ini karena ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menyebabkan pengoptimalan potensi daerah belum maksimal.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah :

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?

3. Apakah PAD dan dana perimbangan secara bersama berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Masalah

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendapat gambaran mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Cianjur dan menyimpulkan hasil penelitian mengenai bagaimana hubungan variabel-variabel yang diteliti. Selain itu sebagai kajian dalam penyusunan skripsi dan sebagai dasar implementasi ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam pemerintahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan secara bersama terhadap kinerja keuangan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang keadaan instansi serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

1.4.2 Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang akan melakukan penelitian pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Anggoro dalam Mardiani (2020) menyatakan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Menurut Baldric dalam Amalina (2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Ariska (2021) pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih dalam satu periode tertentu yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah diharapkan terus bertambah agar mampu mendanai sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun terus meningkat, sehingga tercapainya kemandirian daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dari keterangan di atas dapat kita pastikan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diambil dari kemampuan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,

ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pratiwi, 2018:36). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Pajak Provinsi, antara lain:

- i. Pajak Kendaraan Bermotor.
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- iv. Pajak Air Permukaan.
- v. Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

- i. Pajak Hotel
- ii. Pajak Restoran
- iii. Pajak Hiburan
- iv. Pajak Reklame
- v. Pajak Penerangan Jalan
- vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- vii. Pajak Parker
- viii. Pajak Air Bawah Tanah
- ix. Pajak Sarang Burung Wallow
- x. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan
- xi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontra prestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan. Jenis pendapatan retribusi Kota/Kabupaten terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Termasuk dalam retribusi jasa umum di antaranya adalah

retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi pada jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/manfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam retribusi jasa usaha di antaranya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, distribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong ayam, retribusi pelayanan ke pelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Sementara itu retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam distribusi perizinan di antaranya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Tujuan BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang efektif dalam melayani masyarakat. Dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah seperti:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Lain giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
- c. Pendapatan giro
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan aturan pengadaan barang dan atau aturan jasa oleh daerah.

2.1.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Tujuan mengukur Rasio Efektivitas PAD sendiri adalah guna memperlihatkan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal mengerahkan pemasukan PAD sesuai apa yang menjadi target awal. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diformulasikan sebagai berikut dalam jurnal (Halim & Kusufi dalam Supriyadi, 2021)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat di kategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

| Kriteria | Persentase |
|----------------|-----------------|
| Sangat Efektif | Di atas 100% |
| Efektif | 90-100% |
| Cukup Efektif | 80-90% |
| Kurang Efektif | 60-80% |
| Tidak Efektif | Kurang dari 60% |

Sumber: (Munir dalam Supriyadi, 2021)

2.2 Dana Perimbangan

2.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Halim (2020) Dana Perimbangan adalah salah satu pendapatan daerah dalam pendapatan transfer pada transfer pemerintah pusat. Dalam kerangka otonomi daerah, Dana Perimbangan mencerminkan upaya dan asas keadilan perimbangan antara pusat dan daerah, selain upaya dan asas pemerataan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan pembangunan di daerah-daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dana perimbangan merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah dan daerah sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dan meningkatkan kapasitas potensi perekonomian daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan meliputi tiga bagian yaitu, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khusus Dana Perimbangan. Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar lain DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Penerimaan DBH Pajak bersumber dari:

a. Dana bagi hasil pajak, meliputi :

1. Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
3. Bagi hasil dari pajak penghasilan pasal 24 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri (PPh WPOPND) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

b. Dana bagi hasil sumber daya alam, berasal dari :

1. Kehutanan
 2. Pertambangan Umum
 3. Perikanan
 4. Pertambangan minyak dan bumi
 5. Pertambangan gas bumi
 6. Pertambangan panas bumi
2. Dana Alokasi Umum
- Dana alokasi umum bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dana Alokasi Khusus
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019). DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, pengalokasian DAK ini sepenuhnya dalam wewenang pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus dapat dilihat di Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khusus Dana Perimbangan.

2.2.3 Pengukuran Dana Perimbangan

Menurut Mahmudi dalam Amalina (2022) rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dana perimbangan yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Rasio ketergantungan daerah ini untuk menunjukkan seberapa daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Nilai ketergantungan di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Klasifikasi Kriteria Nilai Rasio Ketergantungan

| Kriteria | Persentase |
|---------------|------------|
| Sangat Rendah | 0-10% |
| Rendah | 10-20% |

| | |
|---------------|-------------|
| Sedang | 20-30% |
| Cukup | 30-40% |
| Tinggi | 40-50% |
| Sangat Tinggi | Di atas 50% |

Sumber: (Wahap dalam Amalina, 2022)

2.3 Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan, yang disebut kinerja adalah hasil keluaran dari kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Kinerja keuangan merupakan pengukuran pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan suatu instansi.

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang dijadikan indikator keuangan dalam memastikan kemampuan daerah untuk melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari dalam Putri, 2016)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal hasil kerja di bidang keuangan daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undang yang hasilnya dikembalikan kepada daerah. Hal ini baik untuk kepentingan dan pengembangan masyarakat dan lingkungan daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

2.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi dalam Putri (2022) “analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diperoleh dari laporan keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan”.

Menurut Mardiasmo dalam Maulina (2021) menyatakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan guna memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
2. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Febriansyah dalam Putri (2022) “menyatakan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio keuangan merupakan alat ukur atau indikator kinerja keuangan pemerintah daerah”. Rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini mengungkapkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka mengindikasikan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

2. Rasio

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100$$

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa tesis maupun jurnal-jurnal melalui internet. Penulis menjabarkan secara ringkas dalam tabel penelitian terdahulu di bawah ini yang menjadi acuan penulis yang sesuai dengan penelitian saat ini antara lain :

Tabel 2. 3
 Penelitian Sebelumnya

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|--------------------|---|
| 1. | Euis Tilis Tianawati, (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 | Pendapatan Asli Daerah, Dana Tranfer, Kinerja Keuangan | X1: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah X2: Rasio Ketergantungan Daerah Y: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | Metode kuantitatif | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 Dana Transfer tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|--------------------|--|
| | | | | | Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. |
| 2. | Mia Jauhariah, (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021 | Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal, Kinerja Keuangan | X1: Rasio Kemampuan Keuangan Daerah X2: Rasio Efektifitas Belanja Modal Y: Rasio Efisiensi Belanja Daerah | Metode kuantitatif | Pengaruh Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2014-2021. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2014-2021. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|---|--------------------|--|
| | | | | | bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2014-2021. |
| 3. | Shalaisya Labiba Khayyira Widodo, (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020. | Pendapatan Asli Daerah, DAK, DAU, Kinerja Keuangan | X1: Rasio kemampuan keuangan daerah X2: Rasio ketergantungan DAU terhadap keuangan daerah X3: Rasio ketergantungan DAK terhadap keuangan daerah. Y: Rasio kemandirian keuangan daerah. | Metode kuantitatif | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013-2020. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013-2020. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|--------------------|--|
| | | | | | <p>berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013-2020.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2013-2020.</p> |
| 4. | Mega Harun Utami, (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan | X1: Rasio Kemampuan Keuangan Daerah. X2: Rasio Ketergantungan | Metode Kuantitatif | Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|------------------------|---|-----------------|--|
| | Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 | | <p>ngan Keuangan Daerah.</p> <p>X3:</p> <p>Rasio Efektifitas Belanja Modal.</p> <p>Y:</p> <p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.</p> | | <p>Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.</p> <p>Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.</p> <p>Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara</p> |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|--------------------|--|
| | | | | | simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. |
| 5. | Syifa Amalina, (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai | X1: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah X2: Rasio Ketergantungan Dana Perimbangan Y: Rasio Aktivitas Belanja Pegawai | Metode Kuantitatif | Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|---|-----------------|--|
| | | | | | tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. |
| 6. | Meidy Patricia Adinata (2022) Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur | Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan | X1: <i>Debt To Equity Ratio</i> X2: Ukuran Pemerintah Daerah X3: Dana Perimbangan Y: Rasio Kemandirian | | Leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dana Perimbangan berpengaruh negatif |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|---|--------------------|---|
| | | | | | signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. |
| 7. | Verawaty, dkk (2020) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | PAD, DAU, DAK, DBH dan Kinerja Keuangan | X1: PAD X2: DAU, X3: DAK X4: DBH. Y: PAD dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah | Metode Kuantitatif | Terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. terdapat pengaruh negatif DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016 terdapat pengaruh negatif DAK terhadap |

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|------------------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kot a di Sumatera Selatan tahun 2014-2016 DBH tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ko ta di Sumatera Selatan tahun 2014- 2016. |
| | | | | | |

Sumber: Jurnal dan skripsi oleh peneliti

Dari tabel penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini merupakan replikasi dari Euis Tilis Tianawati (2022), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Euis Tilis Tianawati (2022) di antaranya lokasi penelitian yang dilakukan berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur setelah pada penelitian sebelumnya mengambil lokasi penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya sampel yang digunakan pada penelitian ini data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Cianjur pada Tahun Anggaran 2018-2022 setelah pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2016-2020.

2.4.2 Kerangka Pemikiran

2.4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki setiap daerah melalui penerimaan daerah dari berbagai aspek, di antaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber penerimaan daerah ini di kelola langsung oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai program pemerintahan yang telah disusun sebelumnya agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan baik. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda.

Dalam Penelitian Putri (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan asli daerah naik, maka secara tidak langsung kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

2.4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Dana perimbangan yang diterima akan menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Terdapat keterkaitan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini karena dana perimbangan merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam penelitian Ariska (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima daerah maka semakin rendah atau menurun tingkat kemandirian daerah. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

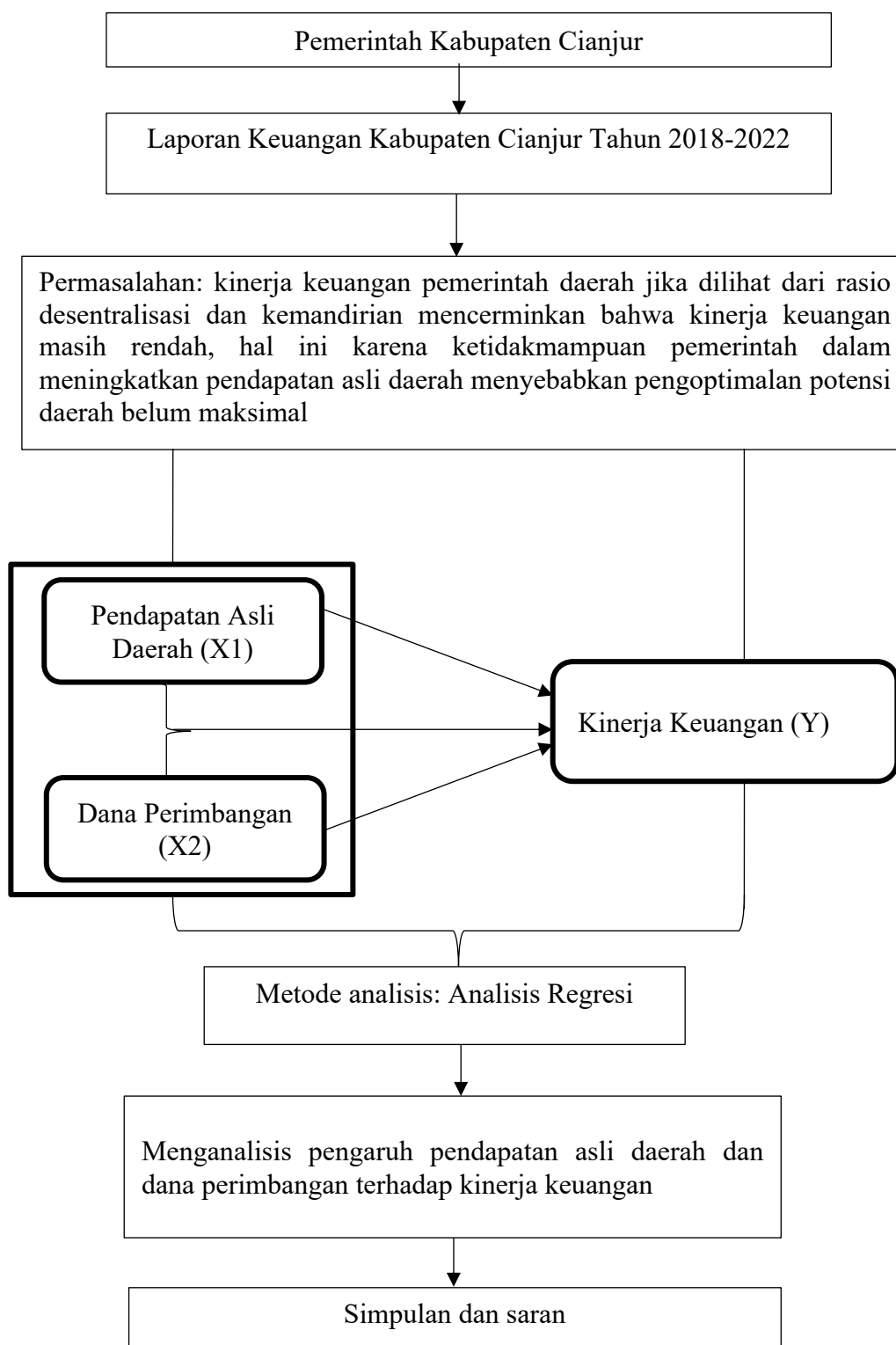
2.4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Secara Simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PAD mendorong kinerja keuangan pemerintah menjadi lebih baik, hal ini karena PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah dapat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Sedangkan,

peningkatan dana perimbangan yang diterima menandakan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini bisa di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum bisa dipastikan, sehingga harus dilakukan penelitian agar mengetahui apakah data yang diteliti menerima hipotesis penelitian atau menolaknya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Hipotesis 2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Hipotesis 3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi dengan disertai data statistik, karakteristik dan hubungan antar variabel dengan studi kasus Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. Variabel independen atau variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Penelitian ini menggunakan unit analisis *Geographic region* yang merupakan sumber data yang berasal dari respon suatu daerah. Dalam hal ini unit analisis geografis regional tersebut adalah Pemerintahan Kabupaten Cianjur periode 2018- 2022.

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi pada penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Sumber data yang diperoleh berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang sudah diolah, yang dimaksud dengan memperoleh dari laporan anggaran dan realisasi dari masing-masing pemerintahan yang telah dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dapat diakses melalui *website* resmi Kabupaten

Cianjur, dan *website* resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan data yang telah diambil akan diolah sesuai dengan kebutuhan variabel dan peneliti.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Proses analisis dapat dipermudah dengan adanya pengklasifikasian variabel dalam penjabaran dan pengukuran dari operasional variabel dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Sub Variabel (Dimensi) | Indikator | Ukuran | Skala |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------|
| Pendapatan Asli Daerah (X1) | Efektivitas Pendapatan Asli Daerah | Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah | $\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100$ | Rasio |
| Dana Perimbangan (X2) | Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah | Tingkat Ketergantungan Daerah | $\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$ | Rasio |
| Kinerja Keuangan (Y) | Rasio Derajat Desentralisasi | Tingkat Derajat Desentralisasi | $\frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$ | Rasio |
| | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | $\frac{PAD}{\text{Dana Transfer}} \times 100$ | |

3.5 Metode Penarikan Sampel

3.5.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sejalan dengan itu Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian yang digunakan adalah Kabupaten Cianjur.

3.5.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kab Cianjur tahun anggaran 2018-2022

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode pengumpulan data sekunder dengan mengakses dan mengunduh data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pemerintahan yang berada di Kabupaten Cianjur periode 2018-2022 serta pengumpulan data didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data, yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono dalam Mardiani, 2022). Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yang dihubungkan, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Maka dari itu digunakan statistika parametrik dengan menggunakan berdasarkan sifatnya yaitu kuantitatif. Statistika parametrik terdapat dua hubungan yaitu hubungan timbal balik dan hubungan kausal. Hubungan timbal balik dianalisis menggunakan analisis korelasi dan hubungan kausal dianalisis dengan analisis regresi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui serta menguji kelayakan atas model regresi yang dipergunakan dan memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi dan konsisten. Parameter untuk mengukur apakah data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimator*), pengujian ini juga dimaksudkan

untuk memastikan bahwa data yang didapatkan berdistribusi normal serta di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Maka penelitian ini terdapat empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Berdasarkan penjelasan Priyatno dalam Mardiani (2022) bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji pada model regresi yaitu variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data yang baik digunakan dalam penelitian yaitu dapat berdistribusi normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam metode ini untuk melakukan uji diantaranya:

a. Metode Grafik

Metode grafik digunakan sebagai salah satu cara untuk melihat normalitas dengan menganalisis grafik penyebaran data pada sumber diagonal dan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal.

b. Metode Uji One Sample *Kolmogorov-Smirnov*

Uji One Sample *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk mengetahui distribusi data apakah mengikuti distribusi normal, dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Zhitung dan Ztabel dengan kriteria sebagai berikut:

Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) < Ztabel (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikan (α) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) > Ztabel (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikan (α) 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Priyatno dalam Mardianti (2022) berpendapat bahwa Uji Multikolinearitas yang dimaksud adalah antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel bebas dapat diketahui dengan melihat dari nilai *tolerance* yang tinggi. *Variance Inflation Factor* (VIF) kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Prinsip pengambilan keputusan dengan nilai VIF sebagai berikut:

Jika *tolerance* $< 0,1$ atau nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas.

Jika *tolerance* $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 , maka terjadi multikolinieritas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan penjelasan Priyatno dalam Mardiani (2022) bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Glejser

Dalam pengujian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika nilai *Sig* $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas

Jika nilai *Sig* $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas

2. Uji Grafik Scatterplot

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut:

Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno dalam Mardiani (2022) uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi.

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic *Run Test*. Uji *Run test* hanya digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan uji *Run Test* sebagai berikut:

Jika nilai *Sig* < 0,05 maka terdapat autokolerasi

Jika nilai *Sig* > 0,05 maka tidak terdapat autokolerasi

3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno dalam Mardianii (2022) “analisis regresi linier berganda adalah metode analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel bebas (*independent*) dengan satu variabel terikat (*dependent*). Dalam analisis regresi linier perlu dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan penggunaan model regresi tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terpenuhi, model analisis tersebut layak digunakan. Model persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : Variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah.

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

b_2 : Koefisien regresi Dana Perimbangan

X_2 : Dana Perimbangan

e : Error

3.7.4 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisiensi determinasi.

3.7.4.1 Koefisien Determinasi

Uji koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2).

Nilai koefisiensi determinasi adalah nol sampai satu. Semakin R2 mendekati nol maka semakin kecil kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi *RSquare*, karena penggunaan koefisien *RSquare* mempunyai kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno dalam Mardianti, 2022). Klasifikasi kriteria pengambilan keputusan untuk koefisien determinasi (R2) sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Klasifikasi Koefisien Determinasi (R2)

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00-0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20-0,399 | Rendah |
| 0,40-0,599 | Sedang |
| 0,60-0,799 | Kuat |
| 0,80-1,000 | Sangat Kuat |

3.7.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno dalam Mardiani (2022) Uji $t(t-test)$ merupakan pengujian terhadap koefisiensi regresi secara parsial, pengujian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Perhitungan ($t-test$) selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara simultan.

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat risiko atau signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut :

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Cianjur

Keadaan wilayah Kabupaten Cianjur yang beribukota di Kecamatan Cianjur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di Utara; Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung barat dan Kabupaten garut di Timur; Samudra Hindia/Indonesia di Selatan; dan Kabupaten Sukabumi di Barat Hindia. Sebagian besar Wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah yang sempit.

Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya perairan tanaman pertanian. Sungai terpanjang di Cianjur adalah Sungai Cibuni yang bermuara di Samudera

Secara geografis, kabupaten Cianjur dibedakan dalam tiga Wilayah Pembangunan yakni Wilayah Utara (meliputi 16 Kecamatan: Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet dan Haurwangi). Wilayah Tengah (meliputi 9 Kecamatan: Sukanagara, Takokak, Campaka, Campakamulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak) dan Wilayah Selatan (meliputi 7 Kecamatan: Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda)

Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan area perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, Cianjur selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan.

Dari Luas Wilayah Kabupaten Cianjur, pemanfaatannya meliputi: 83.034 Ha (23,71%) berupa hutan produktif dan konservasi; 58,101 Ha(16,59%) berupa pertanian lahan basah; 97,227 Ha (27,76 %) Berupa lahan pertanian kering dan tegalan; 57,735 Ha (16,49 %) berupa tanah perkebunan; 3.500 Ha (0,10 %) berupa tanah dan pengembalan/pekarangan; 1.239 Ha (0,035 %) berupa tambak/kolam; 25.261 Ha (7,20 %) berupa pemukiman/pekarangan; dan 22.483 Ha (6.42 %) berupa pegunungan lain-lain.

Sebagaimana daerah beriklim tropis maka di wilayah Cianjur utara tumbuh tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur selatan antara lain obyek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Cianjur

Visi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi akan dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas kemana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya.

Adapun visi dan misi Kabupaten Cianjur:

Visi:

“CIANJUR MANDIRI, MAJU, RELIGIUS DAN BERAKHLAK MULIA”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan er industri 4.0
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan Sumber Daya Alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup.

5. Pemanfaatan feformasi dan transormasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era *governance* 3.0

4.1.3 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah.
- b) Sekretariat DPRD.
- c) Inspektorat.
- d) Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 5. Dinas Sosial.
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
 8. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.
 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 16. Dinas Perhubungan.
 17. Dinas Lingkungan Hidup.
 18. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
 19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Badan Daerah terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 4. Badan Pendapatan Daerah.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- f) Kecamatan terdiri atas :
 1. Kecamatan Agrabinta.
 2. Kecamatan Bojongpicung.
 3. Kecamatan Cianjur.
 4. Kecamatan Cibeber.

5. Kecamatan Cilaku..
6. Kecamatan Ciranjang.
7. Kecamatan Cugenang.
8. Kecamatan Cikalongkulon.
9. Kecamatan Campaka.
10. Kecamatan Cibinong.
11. Kecamatan Cidaun. 12.
12. Kecamatan Campakamulya.
13. Kecamatan Cikadu.
14. Kecamatan Cijati.
15. Kecamatan Cipanas.
16. Kecamatan Gekbrong.
17. Kecamatan Haurwangi.
18. Kecamatan Karangtengah.
19. Kecamatan Kadupandak.
20. Kecamatan Leles.
21. Kecamatan Mantle.
22. Kecamatan Naringgul.
23. Kecamatan Pacet.
24. Kecamatan Pagelaran.
25. Kecamatan Pasirkuda.
26. Kecamatan Sukaluyu.
27. Kecamatan Sukaresmi.
28. Kecamatan Sukanagara.
29. Kecamatan Sindangbarang.
30. Kecamatan Takokak.
31. Kecamatan Tanggeung.
32. Kecamatan Warungkondang.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut. Pertama adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Perimbangan (X2), kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu Kinerja Keuangan (Y) pada Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *geografic region* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respons dari suatu wilayah atau daerah. Dalam hal ini unit analisisnya adalah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 sampai dengan 2022 menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Cianjur. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022. Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sampling*.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur

Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mencapai efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah diukur menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Ralisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka diperoleh hasil rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Tabel 4. 1

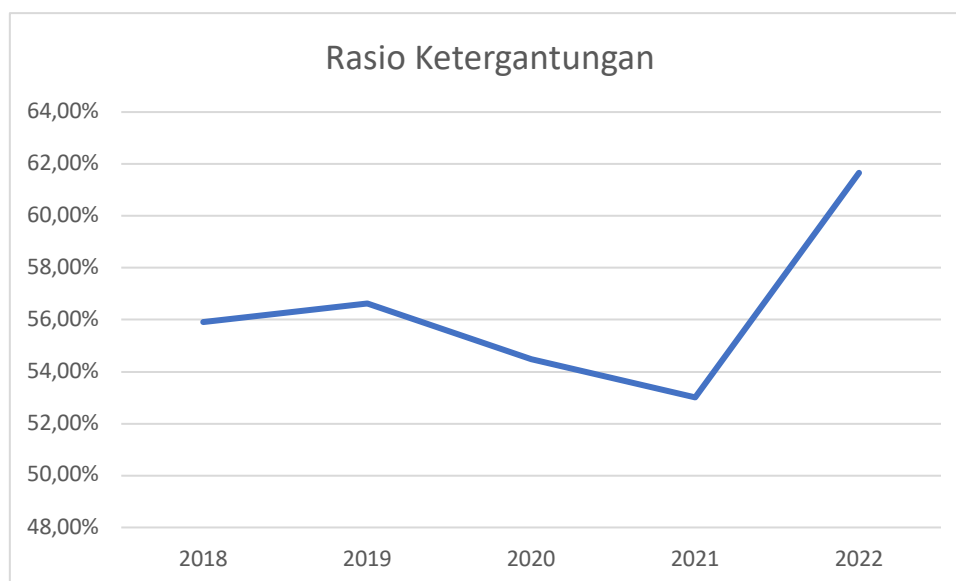
Rasio Efektivitas pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Dalam Miliar Rupiah

| Tahun | Realisasi PAD | Target PAD | Rasio Efektivitas |
|-----------|---------------|------------|-------------------|
| 2018 | 569,84 | 584,97 | 97,41% |
| 2019 | 628,56 | 602,56 | 104,31% |
| 2020 | 577 | 709,82 | 81,29% |
| 2021 | 792,91 | 669,82 | 118,38% |
| 2022 | 556,04 | 1,059,44 | 52,48% |
| Rata-rata | | | 90,77% |

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) (Hasil olah data)

Gambar 4 1
Rasio Efektivitas Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022



Adapun kriteria untuk menetapkan rasio efektivitas pada pendapatan asli daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 2

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

| Kriteria | Persentase |
|----------------|-----------------|
| Sangat Efektif | Di atas 100% |
| Efektif | 90-100% |
| Cukup Efektif | 80-90% |
| Kurang Efektif | 60-80% |
| Tidak Efektif | Kurang dari 60% |

Sumber: (Munir dalam Supriyadi, 2021)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Cianjur pada tahun 2018-2022 setiap tahunnya ada perkembangan PAD mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 97,41% yang kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 104,31%. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 81,29%. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 118,38% dan tahun 2022 menurun menjadi 52,48%. Dapat disimpulkan kenaikan PAD terbesar adalah pada tahun 2021 yaitu mencapai 118,38%, dan nilai PAD terkecil adalah tahun 2022 yang mencapai 52,48%. Rata-rata rasio efektivitas memang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur sudah di tingkat efektif tetapi terjadi lonjakan penurunan di tahun 2022 yaitu menjadi 52,48% dari yang

ditargetkan. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur mengalami ketidakseimbangan pada setiap tahunnya, maka perlu adanya optimalisasi agar bisa mencapai target yang diharapkan

4.2.2 Dana Perimbangan Kabupaten Cianjur

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Dana Perimbangan diukur menggunakan Rasio Ketergantungan untuk mengukur berapa besar ketergantungan suatu daerah tersebut. Berikut adalah rumus rasio ketergantungan:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka diperoleh hasil rasio ketergantungan dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Tabel 4. 3

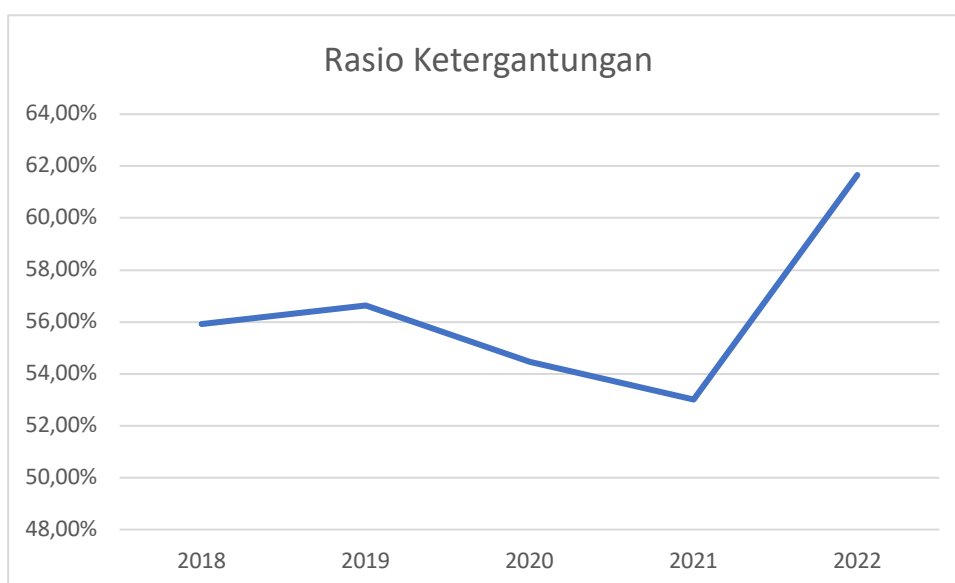
Rasio Ketergantungan pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Dalam Miliar Rupiah

| Tahun | Dana Perimbangan | Pendapatan Daerah | Rasio Ketergantungan |
|-----------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2018 | 2246,20 | 4017,39 | 55,91% |
| 2019 | 2262,68 | 3995,41 | 56,63% |
| 2020 | 2091,75 | 3840,5 | 54,47% |
| 2021 | 2149,80 | 4055,7 | 53,01% |
| 2022 | 2453,35 | 3978,96 | 61,66% |
| Rata-rata | | | 56,34% |

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) (Diolah oleh penulis)

Gambar 4. 2
Rasio Ketergantungan Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022



Adapun kriteria untuk menetapkan rasio ketergantungan pada dana perimbangan dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 4
Klasifikasi Kriteria Nilai Rasio Ketergantungan

| Kriteria | Persentase |
|---------------|-------------|
| Sangat Rendah | 0-10% |
| Rendah | 10-20% |
| Sedang | 20-30% |
| Cukup | 30-40% |
| Tinggi | 40-50% |
| Sangat Tinggi | Di atas 50% |

Sumber: (Wahap dalam Amalina, 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 hasil Rasio Ketergantungan yaitu sebesar 55,91% yang pada tahun berikutnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 56,63%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 54,46%, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 53,01%, hingga pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai angka nilai sebesar 61,66%. Dari hitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 61,66% dan nilai ketergantungan terkecil terjadi ditahun 2021 mencapai 53,01%. Dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Cianjur belum maksimal mengelola keuangan daerahnya karna masih mengalami kenaikan

dana transfer dari pemerintah yang juga disebut belum bisa mandiri atau masih sangat ketergantungan. Dan rata-rata dari tahun 2018 sampai 2022 dana perimbangan masih dikategorikan dalam tingkat ketergantungannya sangat tinggi.

4.2.3 Kinerja Keuangan Kabupaten Cianjur

1. Gambaran Derajat Desentralisasi Kabupaten Cianjur

Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerahnya dari sumber-sumber pendapatan yang ada. Pemerintah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang baik mampu untuk membiayai setiap kebutuhan daerahnya. Komponen utama dalam menentukan derajat desentralisasi fiskal adalah PAD (pendapatan asli daerah). Kinerja pemerintah daerah dapat juga dilihat dengan derajat desentralisasi fiskal, jika pemerintah dapat mengatur sumber-sumber pendapatan dan memberdayakan masyarakat maka keuangan daerah akan baik tidak akan membebani pemerintah pusat. Namun kondisi setiap daerah beragam baik sumber daya alam dan manusianya ini menjadi tantangan besar bagi setiap daerah untuk menjadikan kekurangan menjadi kelebihan. Dalam melihat derajat desentralisasi fiskal dari nilai 0,00-10,00% sangat kurang, 10,01-20,00% kurang, 20,01-30,00 sedang, 30,01-40,00% cukup, 40,01-50,00 baik, dan 50% < sangat baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka diperoleh hasil derajat desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

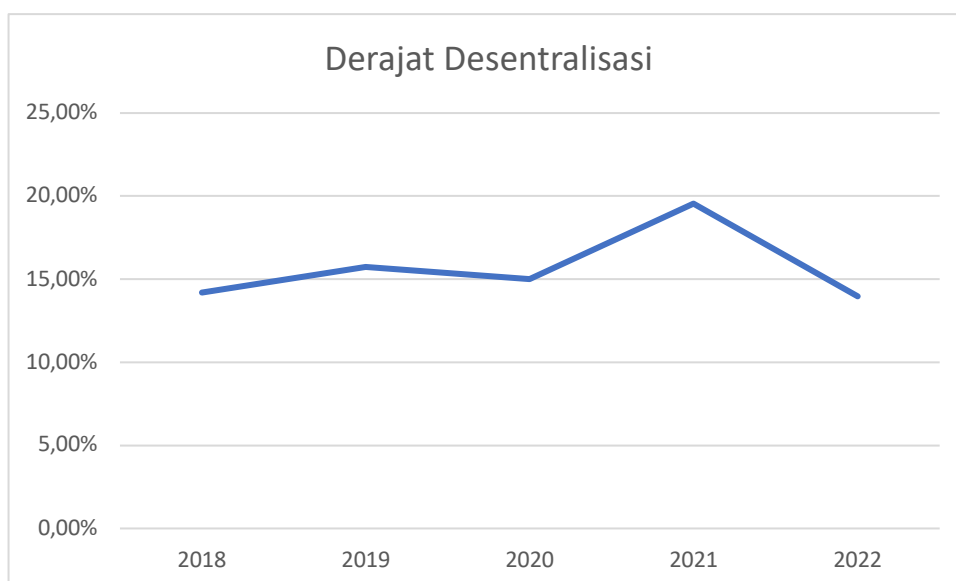
Tabel 4. 5

Derajat Desentralisasi pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

| Dalam Miliar Rupiah | | | |
|---------------------|--------|-------------------|------------|
| Tahun | PAD | Pendapatan Daerah | Persentase |
| 2018 | 569,84 | 4017,39 | 14,18% |
| 2019 | 628,56 | 3995,41 | 15,73% |
| 2020 | 577 | 3840,5 | 15,02% |
| 2021 | 792,91 | 4055,7 | 19,55% |
| 2022 | 556,04 | 3978,96 | 13,97% |
| Rata-rata | | | 15,69% |

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) (Diolah oleh penulis)

Gambar 4. 3
Derajat Desentralisasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022



Adapun kriteria untuk menetapkan derajat desentralisasi dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 6
Skala interval desentralisasi

| | |
|----------------|---------------|
| 00,00-10,00% | Sangat Kurang |
| 10,01-20,00% | Kurang |
| 20,01-30,00% | Sedang |
| 30,01-40,00% | Cukup |
| 40,01-50,00% | Baik |
| Lebih dari 50% | Sangat Baik |

Dari tabel di atas menunjukkan derajat desentralisasi yang masih di bawah 20% yang berarti nilai derajat desentralisasi daerah di Kabupaten Cianjur masih kurang baik. Pada tahun 2018 berada pada angka 14,18%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 15,73% tetapi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 15,02%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 19,55% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,97%. Rata-rata nilai derajat desentralisasi di Kabupaten Cianjur masih rendah, hal ini menunjukkan sumber-sumber pemasukan di daerahnya tergolong kecil baik dari pajak dan yang lainnya.

2. Gambaran Rasio Kemandirian Kabupaten Cianjur

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan yang diperoleh dari transfer pusat. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat membiayai keperluan daerahnya. Data rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dari publikasi keuangan daerah yang diterbitkan oleh BPS yang diolah dengan rumus yang sesuai. Daerah yang baik memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Kemandirian itu ditunjukkan dengan nominal pendapatan asli daerah yang diperoleh jika besar maka pemerintah daerah efektif dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka diperoleh hasil rasio kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

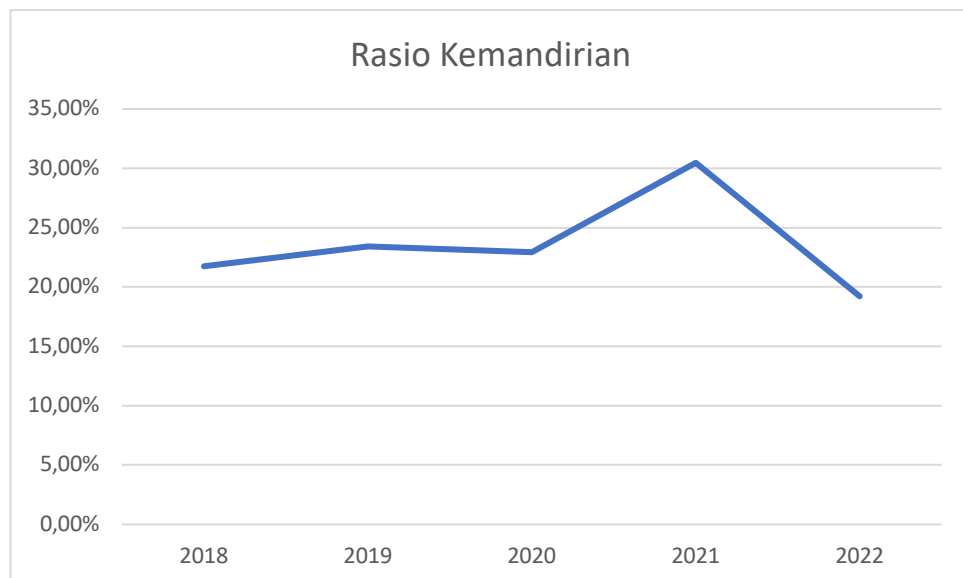
Tabel 4. 7

Rasio Kemandirian pada Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

| Dalam Miliar Rupiah | | | |
|---------------------|--------|---------------|------------|
| Tahun | PAD | Dana Transfer | Persentase |
| 2018 | 569,84 | 2618,40 | 21,76% |
| 2019 | 628,56 | 2686,07 | 23,40% |
| 2020 | 577 | 2515,68 | 22,94% |
| 2021 | 792,91 | 2602,14 | 30,47% |
| 2022 | 556,04 | 2893,09 | 19,22% |
| Rata-rata | | | 23,56% |

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) (Diolah oleh penulis)

Gambar 4 4
Rasio Kemandirian Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022



Adapun kriteria untuk menetapkan rasio kemandirian dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 8

Kriteria rasio kemandirian keuangan

| Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian |
|--------------------|-------------------|
| Rendah Sekali | 0-25% |
| Rendah | >25-50% |
| Sedang | >50-75% |
| Tinggi | >75-100% |

Sumber: (Halim dalam Runjung, 2022)

Dari tabel di atas menunjukkan rasio kemandirian daerah yang masih di bawah 50% yang berarti keadaan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Cianjur masih kurang baik. Pada tahun 2018 berada pada angka 21,76%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 23,40% tetapi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 22,94%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 30,47% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 19,22%. Rata-rata nilai rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Cianjur masih rendah, ini dikarenakan masih rendahnya penerimaan PAD. Dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Cianjur belum bisa membiayai setiap keseluruhan kegiatan daerahnya seperti pembangunan dan kebutuhan yang lainnya. Rasio kemandirian keuangan

daerah Kabupaten Cianjur belum bisa menunjukkan tren baik, nilainya masih berfluktuasi dan juga relatif masih sangat rendah.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), serta standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 9

Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|---|---------|---------|-----------|----------------|
| PAD_X1 | 5 | 556,04 | 792,91 | 624,8700 | 97,86274 |
| DP_X2 | 5 | 2091,75 | 2453,35 | 2240,7560 | 138,00570 |
| KK_Y | 5 | 19,22 | 30,47 | 23,5580 | 4.19028 |
| Valid N (listwise) | 5 | | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.1 atas pengujian deskriptif statistik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis deskriptif variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 628,8700 dan simpangan baku (*standar deviation*) 97,86274. Nilai terendah (*minimum*) Sebesar 556,04 dan tertinggi (*maximum*) Sebesar 792,91

b. Dana Peimbangan

Hasil analisis deskriptif variabel Dana Perimbangan Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2240,7560 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 138,00570. Nilai terendah (*minimum*) Sebesar 2091,75 dan tertinggi (*maximum*) Sebesar 2453,35

c. Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis deskriptif variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar

23,5580 dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 4,19028. Nilai terendah (*minimum*) sebesar 19,22 dan tertinggi (*maximum*) sebesar 30,47.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (*best Linier unbiased Estimator*). Untuk itu diperlukan beberapa pengujian data di antaranya adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Uji Normalitas

Analisis Statistik dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik ini dapat digunakan melalui uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis jika nilai signifikan $> 0,05$ maka berdistribusi normal dan jika nilai $< 0,05$ tidak berdistribusi normal. Hasil pengolahan data uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4. 10

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| N | | | 5 |
| Normal Parameters ^{a,b} | | Mean | 0,0000000 |
| | | Std. Deviation | 0,15287981 |
| Most Extreme Differences | Extreme | Absolute | 0,255 |
| | | Positive | 0,255 |
| | | Negative | -0,233 |
| Test Statistic | | | 0,255 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | .200 ^{c,d} |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel diatas merupakan output dari pengolahan data yang diuji untuk uji normalitas dengan one-sample Kolmogorov smirnov, dapat dilihat bahwa hasil nilai signifikansi sebesar 0,200. Dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka nilai residual dari uji tersebut adalah normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai *tolerance* serta Varian Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolonieritas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$. Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|----------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 PAD_X1 | 0,819 | 1,221 |
| DP_X2 | 0,819 | 1,221 |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF menunjukkan nilai PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 1,221 dan nilai tolerance masing-masing menunjukkan nilai sebesar 0,819. Nilai VIF variabel independen tersebut yaitu kurang dari 10 ($1,221 < 10$) dan nilai tolerance lebih dari 0,1 ($0,819 > 0,1$). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukannya adanya masalah multikolonieritas pada antar variabel bebas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai *Sig* $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas
- Jika nilai *Sig* $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas

Tabel 4. 12
Hasil Uji Heteroskedasitas Glejser

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| 1 (Constant) | 0,974 | 1,041 | | 0,936 | 0,448 |
| PAD_X1 | -0,001 | 0,001 | -0,688 | -1,129 | 0,376 |
| DP_X2 | 0,000 | 0,000 | -0,345 | -0,566 | 0,628 |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji glejser dalam mendeteksi keberadaan hubungan heteroskedastisitas pada data sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil output uji glejser di atas tidak ditemukan hubungan heteroskedastisitas, hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi yang diperoleh setiap variabel independen. Pada pendapatan asli daerah nilai signifikansi sebesar 0,376 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 dan pada dana perimbangan sebesar 0,628 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada data tersebut

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada kolerasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Model regresi yang baik tidak terjadi masalah autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan Uji Runs Test. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi dan jika Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka adanya autokorelasi.

Uji Run-test adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat Digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi Atau tidak. Berikut adalah hasil uji Run-test untuk data pada penelitian ini. Hasil pengolahan data uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4. 13

Uji Autokorelasi

Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | -0,06088 |
| Cases < Test Value | 2 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Cases \geq Test Value | 3 |
| Total Cases | 5 |
| Number of Runs | 3 |
| Z | 0,000 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 1,000 |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Dalam Tabel di atas dapat diketahui bahwa Asymp. Sig dua sisi adalah 1,000 atau probabilitas di atas 0,05 ($1,000 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadinya autokorelasi antar nilai residual.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linier Berganda dilakukan dengan mencari koefisien setiap variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan pada model regresi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan. Dalam penelitian ini PAD dan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah sebagai Variabel Dependen. Untuk melakukan Regresi Linier Berganda maka terdapat asumsi klasik yang harus dipenuhi terdahulu seperti uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini seperti : adanya nilai residual yang berdistribusi normal, tidak adanya multikolonieritas, tidak adanya heterosdastisitas dan tidak adanya autokorelasi. Model persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 14

Uji Koefisien Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| 1 (Constant) | 19,404 | 2,370 | | 8,189 | 0,015 |
| PAD_X1 | 0,036 | 0,001 | 0,852 | 29,866 | 0,001 |
| DP_X2 | -0,008 | 0,001 | -0,274 | -9,603 | 0,011 |

Hasil Pengolahan SPSS 26

$$Y = 19,404(\alpha) + 0,036(\text{PAD}) - 0,008(\text{DP})$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 X_1 : Pendapatan Asli Daerah
 X_2 : Dana Perimbangan
 e : error

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada kolom *Unstandardized Coefficients* (B) persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 19,404, artinya apabila semua variabel independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan bernilai 0, maka nilai konstanta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai 19,404.
2. Koefisien regresi variabel independen Pendapatan Asli Daerah bernilai positif sebesar 0.036, maka dapat diartikan bahwa hal ini menunjukkan tingkat PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kenaikan PAD sebesar satu persen dengan asumsi variabel lain bernilai tetap, maka Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.036.
3. Koefisien regresi variabel independen Dana Perimbangan bernilai sebesar -0.008, maka dapat diartikan bahwa hal ini menunjukkan setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar satu persen akan diikuti penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0.008 dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

4.3.4 Analisis Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis akan dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2), pengujian signifikansi parsial (uji-t), dan uji signifikansi simultan (uji F).

4.3.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah pengujian untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variance dari variabel dependennya. Untuk model regresi dengan dua atau lebih variabel dependen, koefisien determinasi di tunjukan oleh nilai adjusted R square ($adj R^2$), seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. 15

Uji (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---|----------|-------------------|----------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------|-------|---------|
| 1 | .999 ^a | 0,999 | 0,997 | 0,21620 |
|---|-------------------|-------|-------|---------|

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R square untuk model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,997 yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 99%, sisanya yakni 1 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.3.4.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dipakai guna memahami apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang digunakan dapat mempunyai pengaruh pada variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 16

Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 19,404 | 2,370 | | 8,189 | 0,015 |
| PAD_X1 | 0,036 | 0,001 | 0,852 | 29,866 | 0,001 |
| DP_X2 | -0,008 | 0,001 | -0,274 | -9,603 | 0,011 |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian untuk variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak, jika dilihat pada tabel di atas bahwa memiliki nilai Sig. 0,001 dan t_{hitung} sebesar 0,852. Diketahui nilai signifikansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($29,866 > 4,30265$), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
2. Hasil pengujian untuk variabel Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak, jika dilihat pada tabel di atas bahwa memiliki nilai Sig. 0,011 dan t_{hitung} sebesar -0,274. Diketahui nilai signifikansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$)

dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-9,603 > -4,30265$), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah

4.3.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat signifikan atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (n-k) maka H_0 ditolak maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap nilai variabel (Y).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ (n-k) maka H_0 diterima maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).

Untuk melihat variabel independen berpengaruh secara signifikan dapat dilihat dengan signifikansi setiap variabel independen dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05.

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka pengaruh variabel independen tidak signifikan.
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka pengaruh variabel independen signifikan.

Tabel 4. 17

Hasil Uji F

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 70,140 | 2 | 35,070 | 750,251 | .001 ^b |
| Residual | 0,093 | 2 | 0,047 | | |
| Total | 70,234 | 4 | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai f_{hitung} sebesar 750,251 dengan taraf signifikan sebesar 0.001, sedangkan nilai f_{tabel} 19.00. Maka dapat disimpulkan bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($750,251 > 19.00$) yang artinya PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan ditemukan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y), Dana Perimbangan (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y).

Maka dari itu dapat disimpulkan dari berbagai hipotesis yang diajukan yakni:

Tabel 4.18
Kesimpulan Hipotesis

| No. | Hipotesis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022. | Nilai signifikansi pendapatan asli daerah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($29,866 > 4,30265$). Maka disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. |
| 2. | Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022. | Nilai signifikansi dana perimbangan sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$) dan t_{hitung} negatif -9,603, Maka disimpulkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. |
| 3. | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022. | Nilai signifikansi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,01 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($750,251 > 19,00$). Maka disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. |

Berikut hasil pengujian hipotesis penelitian ini:

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Hal ini dibuktikan hasil nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $29,866 > 4,30265$ dengan taraf signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,001 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Koefisien bernilai positif,

maka setiap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli yang mana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Apabila sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diterima semakin tinggi, maka akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga mengindikasikan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang semakin baik.

Hal ini sejalan dengan Putri (2022), Tianawati (2022) dan Utami (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah akan mempengaruhi tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Hal ini dibuktikan hasil nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $-9,603 < (-4,30265)$ dengan nilai negatif taraf signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,011 yang berarti bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Koefisien bernilai negatif, maka semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menurun.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini mencerminkan semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah. Pemerintah daerah perlu mengurangi penerimaan dana perimbangan dengan lebih meningkatkan pendapatan dari dalam daerahnya, sehingga dengan penerimaan dana perimbangan yang kecil pemerintah daerah dikatakan mampu untuk membiayai segala kebutuhan pemerintahannya dan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan Thalib (2019), Puti dan Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menurun.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diketahui dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $750,251 > 19,00$. Maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Budiana (2021) dan Ramadani (2022) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan Putri (2022), Tianawati (2022) dan Utami (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan dana perimbangan maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 akan menurun. Hal ini sejalan dengan Thalib (2019), Puti dan Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan Budiana (2021) dan Ramadani (2022) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kegunaan Paktis
 - a. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan diharapkan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan

- b. partisipasi masyarakat dalam wajib pajak serta retribusi daerah agar penerimaan PAD dapat semakin meningkat..
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diharapkan untuk mengelola keuangan daerah dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berupa dana perimbangan seperti dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat tercapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerahnya.
2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan. Selain itu peneliti menyarankan menambahkan variabel independen yang lain seperti belanja modal dan penerimaan pendapatan pemerintah daerah lainnya untuk dikembangkan lagi dan menggunakan rasio lain seperti rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Pada penelitian ini masih terbatas lingkup wilayah Kabupaten Cianjur, peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Meidy Patricia. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Vol 11 No. 2. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. e-ISSN: 2460-0585
- Alvaro, Rendy. (2020). Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah Di Indonesia. JURNAL BUDGET VOL. 5, NO. 1, 2020.
- Amalina, Syifa. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Budiana, Ratma. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020). e-Proceeding of Management : Vol.8, No.6 Desember 2021. ISSN : 2355-9357
- Ermawati, Dyah Ayu Putri. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016- 2020.
- Halim, A., & Maria, E. (2020). *Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN yogyakarta.
- Jauhariah, Mia (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Mardiani, Siti. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Pangestu, Rangga. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1080–1088 ISSN 2685-869X
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Dana Perimbangan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta

- Putri, Rizkiadinda Chinta Cheppy. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Putri, Salsabila Pramestya dan Dyah Ratnawati. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 6 No 2, Juni 2023. E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259.
- Ramadani, Alkansa Fadila. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Management and Bussines (JOMB)* Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2022 p-ISSN: 2656-8918.
- Ramadhan, Fitrah. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ratnasari, Dwi. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*. Vol 17 No. 1. P-ISSN: 1907-9958 | E-ISSN: 2385-9246.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Arya Putra. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 8 No. 1 April 2021, P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139.
- Thalib, Firmansyah. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Di Jawa Timur Periode 2013-2017. Artikel Ilmiah. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
- Tianawati, Euis Tilis. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utami, Mega Harun. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021. *Skripsi*. Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Widodo, Shalaisya Labiba Khayyira, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013-2020. *Skripsi*. Bogor:
Universitas Pakuan Bogor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismananda Azimatulloh

Alamat : Kp. Cibitung Rt 04 Rw 02 Desa Nagrak Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Boogor

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 04 Desember 1997

Agama : Islam

Pendidikan :

- SDN Nagrak 01
- SMP As-Syuja'iyah
- SMA As-Syuja'iyah
- Universitas Pakuan

Bogor 25 Juli 2024
Penulis,



Ismananda Azimatulloh